

KURIKULUM INDONESIA: DARI *LEERPLAN* MENUJU KURIKULUM NASIONAL

Agung Pardini

Sekolah Guru Indonesia
guruagungpardini@gmail.com

Abstrak

Perkembangan awal kurikulum di Indonesia disusun dari bentuk yang sangat sederhana dengan biaya terbatas dan tanpa melewati proses kajian dan uji coba lapangan yang menyeluruh. Saat ini, Pengembangan kurikulum modern dan kaitannya dengan kegiatan instruksional (pembelajaran) setidaknya meliputi empat elemen dasar. Pertama, mengidentifikasi maksud dan tujuan pendidikan. Kedua, memilih pengalaman belajar atau proses pembelajaran yang relevan untuk pencapaian tujuan pendidikan. Ketiga, mengelola pengalaman belajar secara sistematis. Keempat, melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengalaman belajar yang sudah dikerjakan tersebut. Setidaknya terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum di Indonesia, yakni: perubahan politik, serta perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional.

Sulit melepaskan kurikulum dari situasi politik dan pemimpin politik yang tengah berkuasa, karena kurikulum itu sendiri adalah sebuah produk politik. Namun bukan berarti penguasa pemerintahan dapat menetapkan suatu kurikulum sekehendak hati dan hasrat politiknya. Selain berkembang karena terjadi perubahan situasi politik atau juga karena adanya pergantian kepemimpinan nasional, kurikulum juga mengalami revisi seiring dengan dinamika yang terjadi pada kondisi masyarakat yang dikaji dalam perencanaan pembangunan nasional dalam merespon perubahan zaman.

Kata-kata kunci: Kurikulum, Pembelajaran, dan Pendidikan

PENDAHULUAN

Perkembangan kurikulum sulit untuk dilepaskan dari pengaruh perubahan zaman dan dinamika situasi politik pada sebuah negara. Kurikulum selain dikembangkan menurut kebutuhan masyarakat di masa mendatang, namun juga ditentukan oleh kebijakan siapa yang tengah berkuasa. Akibatnya, pada setiap pergantian rezim pemerintahan di Indonesia, biasanya juga akan diikuti oleh pengembangan kurikulum, atau bahkan sampai merubah kurikulum yang sudah ada. Jadi, perkembangan atau perbaikan kurikulum dikarenakan adanya bergantinya kekuasaan kemudian menjadi suatu kebijakan atau keputusan politik yang sangat lumrah terjadi di negara kita.

Dalam perencanaan pembangunan nasional, kurikulum sebagai perangkat dalam penyelenggaraan pendidikan, tentu memiliki keterkaitan dengan bidang-bidang pembangunan yang lain. Sebagai sektor yang juga menyangkut urusan hajat hidup orang banyak, pendidikan dijadikan sebagai salah satu indikator kemajuan suatu negara. Pemerintah atau negara menjadi pemegang peranan paling dominan dalam urusan-urusan yang berkenaan dengan pendidikan. Sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945, Pasal 31, Ayat (2), tertulis bahwa: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.

Bila menengok pada sejarah pendirian bangsa ini, Beberapa waktu menjelang kemerdekaan, para tokoh perumus konstitusi kita sudah membahas terkait dengan pentingnya sebuah kurikulum. Dalam lampiran risalah sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang berlangsung dua tahap, antara 28 Mei – 1 Juni 1945 dan 10 – 17 Juli 1945, tertera bahwa: “Tentang susunan pelajaran pengetahuan umum harus ditetapkan suatu daftar pengajaran sedikit-sedikitnya (minimum *leerplan*), yang menetapkan luas-tingginya pelajaran pengetahuan, dan kepandaian umum, serta pula pendidikan budi pekerti, teristimewa pendidikan semangat bekerja, kekeluargaan, kebaktian, cinta tanah air, serta keprajuritan. Syarat-syarat itu diwajibkan untuk semua sekolah, baik kepunyaan negeri maupun partikelir (SetnegRI 1995).

Jika merujuk pada tinjauan sejarah yang lebih awal lagi, yakni pada pendirian perguruan Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara memiliki pandangan bahwa model kurikulum pendidikan yang dikembangkan oleh Maria Montessori di Eropa dan Rabindranath Tagore di India sangatlah penting dan paling sesuai dengan budaya Indonesia (Jawa). Sekolah menurutnya berfungsi untuk membentuk manusia terdidik dan berbudi pekerti luhur. Sistem pendidikan kolonial yang terlalu

menyuburkan intelektualitas dianggap dapat mematikan perasaan dan mengaburkan kemerdekaan budi (Nugraha 2011). Jadi ini menegaskan bahwa pengembangan kurikulum bagi sebuah sekolah bukan sekedar upaya untuk menyiapkan rencana pengajaran saja, tetapi juga mesti memperhatikan terlebih dahulu penetapan filosofi pengajaran yang disesuaikan dengan jiwa zaman dan kondisi kultural masyarakat.

Dalam paradigma yang menyatakan pendidikan sebagai sebuah sistem, kurikulum dan pembelajaran merupakan dua komponen yang saling berhubungan. Kurikulum sendiri adalah komponen isi atau program dari pendidikan, sedangkan pembelajaran adalah salah satu bentuk implementasi dari pelaksanaan pendidikan (Mandalika & Usman 2004). Kurikulum berfungsi untuk memberi pedoman pendidikan dalam upaya membentuk jati diri manusia yang seutuhnya. Maka falsafah yang dianut oleh suatu kurikulum untuk kurun waktu tertentu berkaitan erat dengan konsepsi tentang manusia itu sendiri. Dari konsepsi ideal tentang manusia yang diusung pada suatu kurikulum diharapkan mampu membentuk perubahan mentalitas dalam masyarakat.

Pelaksanaan kurikulum sebagai bagian penting dari kebijakan pendidikan akan mengalami kegagalan, bahkan mungkin berpotensi akan sulit diketahui tingkat keberhasilannya jika hanya berlangsung sepiantas saja dikarenakan munculnya kebijakan baru. Sehingga idealnya suatu siklus pendidikan mestinya berlangsung antara 10–20 tahun (Indar 1995). Hanya dalam impelementasinya, kurikulum di Indonesia beberapa kali mengalami revisi tidak lebih dari 10 tahun saja. Kondisi ini terjadi saja karena munculnya situasi politik yang berubah, atau karena ditemukannya kekurangan pada isi kurikulum lama.

Dalam kurun waktu 71 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, setidaknya telah mengalami 10 kali perbaikan atau perubahan kurikulum. Perkembangan kurikulum ini tentunya merupakan upaya negara untuk membangun sistem pendidikan nasional yang kuat untuk mendukung kemajuan bangsa tanpa melupakan jati diri dan akar-akar kebudayaan nasional. Makalah ini akan mendeskripsikan tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, sejak awal kemerdekaan hingga kurikulum 2013 saat ini. Dari deskripsi ini maka akan diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan kurikulum di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan Kurikulum di Indonesia

1. Rencana Pelajaran (*Leerplan*) 1947

Kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak serta merta memberi ruang gerak yang bebas bagi republik yang baru saja lahir.

Kedaulatan yang belum utuh, serta masih bercokolnya tentara Jepang di wilayah Indonesia masih menyulitkan penyelenggaraan tata baru pemerintahan. Beberapa kali pergantian kabinet yang kerap terjadi hanya dalam hitungan bulan, belum memberi waktu yang cukup bagi Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, untuk menyusun suatu kurikulum baru yang dapat menggantikan kurikulum lama peninggalan era penjajahan.

Kondisi pendidikan peninggalan pendudukan Jepang menunjukkan realitas statistik yang lebih buruk dibanding dengan akhir masa kolonialisme Belanda. Jumlah sekolah dasar menurun dari sekitar 21.500 menjadi kisaran 13.500. Sekolah lanjut berkurang drastis dari 850 menjadi 20. Hal ini tentu juga mempengaruhi berkurangnya jumlah guru dan peserta didik (Kartodirjo, dkk 1976). Belum lagi militer Jepang yang sebenarnya telah menyatakan kalah perang itu pergi, tiba-tiba datanglah pasukan Inggris yang ternyata juga membonceng tentara NICA Belanda. Maka muncullah fase Revolusi Fisik atau Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Revolusi Fisik merupakan pemberontakan rakyat dengan mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan bagi kepentingan generasi Indonesia yang akan datang (Yamin 1958). Di tengah konfrontasi militer ini, kabinet baru berhasil mengeluarkan kurikulum perdana bagi sekolah-sekolah formal yang dinamakan dengan Rencana Pengajaran atau *Leerplan* di tahun 1947.

Rencana pelajaran 1947 hanya berisi bahan-bahan pengajaran yang harus diajarkan kepada siswa, berikut dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk singkat tentang metodologi pengajarannya. Susunan dari kurikulum ini hanya memuat dua unsur pokok saja, yakni: (a) daftar jam pelajaran atau struktur program, dan (b) garis-garis besar program pengajaran. Garis-garis besar program pengajaran dalam Rencana Pelajaran 1947 ini memiliki kemiripan sekali dengan silabus (Jasin 1987).

Penyusunan konsep kurikulum perdana ini dikerjakan oleh Panitia penyelidikan Pengajaran yang dikepalai oleh Ki Hadjar Dewantara dan Soeganda Poerbakawatja sebagai sekretarisnya. Panitia ini terdiri dari dua macam komisi, yakni komisi penyelidikan dan komisi pekerja. Para anggotanya berjumlah 50 yang berasal dari para ahli pendidikan, pejabat di lingkungan Kementerian PP dan K, guru-guru senior yang berpengalaman, perwakilan sekolah-sekolah partikelir, PGRI, dan perwakilan lembaga-lembaga pemerintahan. Semua anggota panitia ini kebetulan berlatar belakang pendidikan menurut sistem Belanda (kontinental) (Jasin 1987).

2. Rencana Pelajaran Terurai 1952

Masa setelah Revolusi Kemerdekaan, melahirkan semangat untuk mengganti norma-norma lama yang dianggap feodal peninggalan

zaman kolonial, menuju norma-norma dan peraturan yang baru sebagai bangsa yang berdaulat penuh. Namun sayang, dalam proses transisinya justru menampilkan beberapa sifat kelemahan dalam mentalitas masyarakat Indonesia yang menjauhkan kita dari jiwa pembangunan (Koentjaraningrat 1985). Dalam rapat gabungan Parlemen dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno membacakan piagam yang berisi tentang terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 (SetnegRI 1981). Berarti ini menandakan berakhirnya era Negara Republik Indonesia Serikat yang berdiri berdasarkan hasil dari Konferensi Meja Bundar di tahun 1949.

Namun konsep negara kesatuan yang dipakai saat itu berbeda dengan apa yang termaktub dalam UUD 1945, sebab yang dipakai adalah UUD Sementara Tahun 1950. Perbedaan utamanya terletak pada sistem pemerintahan yang dipakai. Pada UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer, yakni presiden hanya sebagai kepala negara saja, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Sehingga kita menyebut fase ini dengan nama demokrasi parlementer

Pada awal masa demokrasi parlementer ini keluarlah Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Untuk menguatkan undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dengan Menteri Agama No.17678 tahun 1951 untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pendidikan agama bagi seluruh sekolah-sekolah di Indonesia. Salah satu isi peraturan bersama itu adalah: "Rencana Pelajaran Agama ditetapkan oleh Kementerian Agama sesudah disetujui oleh Kementerian PP & K" (Darajat 2016). Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No.4 tahun 1950, pada Pasal 10 ayat (20) dinyatakan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama, antara lain adalah madrasah, yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dinyatakan telah memenuhi kewajiban wajib belajar (Asrohah 2001).

Rencana Pelajaran 1947 kemudian diperinci lagi dalam bentuk Rencana Pelajaran Terurai 1952. Hanya saja kurikulum ini hanya terbatas pada mata pelajaran: Bahasa Indonesia, Bahasa daerah, berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi dan Sejarah. Jadi Rencana Pelajaran Terurai 1952 adalah hasil pengembangan atau penyempurnaan Rencana Pelajaran 1947. Adapun perincian program pengajaran itu antara lain bahwa beberapa mata pelajaran disertai maksud dan tujuan kurikulumnya secara eksplisit, berikut cara mengajarkan dan ketentuan ulangan atau evaluasinya (Jasin 1987).

3. Rencana Pendidikan 1964

Pada tahun 1960, Pemerintahan Era Demokrasi Terpimpin atau yang dikenal kemudian dengan istilah Orde Lama mencetuskan lima konsepsi pendidikan yang disebut "Pancawardhana" (lima pokok perkembangan). Ini merupakan kritik atas sistem pendidikan yang dianggap masih terlalu mementingkan aspek intelektualistis serta masih terbawa sistem pendidikan kolonial. Adapun isi Pancawardhana itu adalah:

1. Perkembangan cinta bangsa dan tanah air dan masalah moral nasional
2. Perkembangan intelegensi
3. Perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir – batin
4. Perkembangan keprigelan (kerajinan tangan)
5. Perkembangan jasmani (Kartodirjo, dkk 1976)

Susunan Rencana Pendidikan 1964 juga masih dipandang sebagai kurikulum yang sederhana. Di dalamnya hanya terdiri dari 4 unsur pokok, yakni: (a) Dasar, tujuan, dan sistem pendidikan dasar, (b) struktur program kurikulum, (c) garis-garis besar program pengajaran tiap wardhana, dan (d) pedoman pelaksanaan hari krida di sekolah. Hari krida adalah hari untuk berlatih bagi para siswa dengan diberi kebebasan untuk mengikuti kegiatan di berbagai bidang, seperti: kebudayaan, kesenian, olahraga, ataupun permainan dengan di bawah bimbingan gurunya (Jasin 1987).

4. Kurikulum 1968

Pergantian rezim Orde Lama menjadi pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan-kebijakan Orde lama dianggap lebih banyak didasarkan atas perhitungan-perhitungan untuk tujuan politik berslogan "mercusuar". Sedangkan urusan ekonomi tidak banyak menjadi pertimbangan. Tugas utama yang mula-mula mesti ditangani oleh pemerintahan yang baru saat itu adalah untuk menghentikan proses kemerosotan ekonomi yang ditandai dengan hyper inflasi hingga mencapai angka 650% di tahun 1966, dengan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai rata-rata 3% per tahunnya. Diharapkan upaya perbaikan ini dapat membina landasan yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi yang wajar (Djamin 1984).

Pada garis-garis besar program pengajaran Kurikulum 1968, setiap bidang studi diawali dengan: tujuan-tujuan kurikuler, didaktik-metodik (termasuk kriteria pemilihan bahan-bahan yang akan diajarkan), kegiatan belajar-mengajar, serta alat-alat yang diperlukan. Tujuan-tujuan instruksional pada setiap kelasnya tergantung dari banyaknya bahan atau kemampuan yang ingin dikuasai. Sedangkan pada sistem nilai buku rapor menggunakan dua bentuk nilai, yakni nilai angka dan nilai huruf. Serta tercantum tiga macam nilai,

yakni nilai prestasi, rata-rata kelas, dan usaha dalam mencapai prestasi (Jasin 1987).

5. Kurikulum 1975

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan kurikulum SD 1975, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu memandang perlu diadakannya suatu program penataran nasional yang disebut dengan “Proyek Pembinaan Pendidikan Dasar” (P3D). Tujuan dari program penataran P3D ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi para guru pada aspek: penguasaan kurikulum, penguasaan materi per bidang studi, kompetensi dalam pendekatan metode mengajar, penggunaan dan pembuatan alat peraga yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 1975 (Hamalik 2009).

Kurikulum 1975 termasuk kurikulum yang seluruh bidang studinya berorientasi pada pendekatan tujuan (Slamet 2007). Kurikulum ini memiliki unsur-unsur yang lebih lengkap bila dibandingkan dengan kurikulum yang ada sebelumnya. Kurikulum ini terdiri dari 7 unsur pokok, yakni: (a) Dasar, tujuan dan prinsip-prinsip, (b) struktur program kurikulum, (c) garis-garis besar program pengajaran, (d) sistem penyajian, (e) sistem penilaian, (f) sistem bimbingan dan penyuluhan, dan (g) pedoman supervisi dan administrasi (Jasin 1987). Selain lebih lengkap, Kurikulum 1975 telah menampilkan susunan yang lebih luas dan kompleks tidak sesederhana kurikulum sebelumnya yang lebih banyak membahas daftar jam pelajaran dan garis-garis besar program pengajarannya saja.

Pada tahun 1979, tahun ajaran yang semula dimulai pada awal bulan Januari, kemudian diubah menjadi sekitar minggu ketiga bulan Juli. Ini merupakan salah satu perubahan penting yang terjadi dan masih berlaku hingga saat ini. Perubahan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0211/U/1978 Tanggal 5 Juli 1978 tentang Sistem Tahun Ajaran Sekolah pasal 12 (Depdikbud 1985).

6. Kurikulum 1984

Sepuluh tahun setelah pemberlakuan Kurikulum 1975, diberlakukanlah Kurikulum 1984 yang sejak saat itu kemudian menjadi sebuah tradisi dalam pemerintahan Orde Baru bahwa kurikulum akan selalu mengalami perkembangan baru setiap sepuluh tahun sekali. Struktur serta pemikiran dasar dalam kurikulum untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tidak terlalu banyak mengalami perubahan yang besar. Perubahan yang cukup mendasar terjadi pada struktur kurikulum untuk jenjang SMA. Pada kurikulum SMA 1984 mata pelajaran dikelompokkan menjadi Program Inti yang harus diikuti seluruh peserta didik; serta Program Pilihan yang mengganti istilah penjurusan, seperti: Program Ilmu-Ilmu Fisik, Program Ilmu-Ilmu Biologi, Program Ilmu-Ilmu Sosial, dan Program Pengetahuan Budaya (Hasan & Hamid).

7. Kurikulum 1994

Tahun 1994 adalah awal masuknya bangsa Indonesia ke Pembangunan Jangka Panjang Tahap ke-2 (PJPT Ke-2) yang akan berlangsung selama 25 tahun. Aspek terpenting dari era pembangunan 25 tahun kedua ini adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dengan cara penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi agar sejajar dengan negara-negara lain. Untuk mendukung keberhasilan PJPT II tersebut, pada tanggal 2 Mei 1994, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Presiden Soeharto meresmikan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Ini adalah kelanjutan dari Program Pendidikan Dasar 6 Tahun yang berhasil menaikkan Angka Partisipasi Sekolah Dasar dari 79 % di tahun 1983 hingga mencapai 92% di tahun 1993 hanya dalam jangka waktu satu dekade. Program Wajib Belajar menjadi 9 tahun juga merupakan cara untuk mengurangi problem tenaga kerja anak (Marlow *et all.* 2002).

Pandangan pembangunan yang diterapkan oleh Orde Baru tampak mirip dengan tahapan-tahapan pembangunan yang dikemukakan oleh Walt W. Rostow. Pembangunan oleh WW. Rostow dibagi menjadi 5 tahapan, yakni: pre-industri, take off, mature, dan periode konsumsi massa yang tinggi (Sardjan 1982). Bila merujuk pada pendapat ini, maka pembangunan 25 tahun pertama di era Orde Baru masih pada tahapan pre-industri. Sedangkan PJPT II sudah mulai masuk tahapan *take off* atau lepas landas. Sehingga munculnya kurikulum 1994 diarahkan untuk memberi pedoman pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang siap untuk tinggal landas. Kurikulum 1994 juga bertepatan dengan berakhirnya masa Perang Dingin yang telah berlangsung lebih dari empat dekade.

Munculnya Kurikulum 1994 juga bertepatan dengan pemberlakuan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 060/U/1993 tentang Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun ajaran 1994/1995. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari menindaklanjuti pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum Pendidikan dasar 9 tahun adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP atau yang sederajat. Sebagai bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional, penjabaran kurikulum ini disusun dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian. Maka dalam kurikulum 1994 ini dikenalkanlah mata pelajaran “muatan lokal” yang berfungsi memberikan peluang untuk pengembangan kemampuan siswa sesuai dengan kondisi sekolah atau daerah (Usman 2002).

Salah satu perangkat kurikulum 1994 yang disiapkan oleh pemerintah adalah GBPP (Garis-

Garis Besar Program Pengajaran). GBPP ini merupakan pedoman bagi para guru untuk dapat menyusun program pengajaran tahunan, catur wulan, persiapan pengajaran, beserta penilaiannya. Agar guru dapat leluasa dalam mengembangkan kegiatan pengajarannya sendiri secara kreatif, maka GBPP memang sengaja tidak mencantumkan metode, penilaian, serta sarana yang mesti digunakan (Balitbang Depdikbud 1994).

Hanya dalam pelaksanaannya, kurikulum 1994 berhadapan dengan perubahan situasi politik dan krisis ekonomi yang berujung pada munculnya gerakan reformasi untuk menjatuhkan rezim Soeharto. Runtuhnya pemerintahan Orde baru yang sudah lebih dari 32 tahun berkuasa berimplikasi pada dorongan untuk mengganti berbagai kebijakan lama yang tidak sesuai dengan semangat reformasi. Kurikulum menjadi salah satu komponen yang digugat oleh publik, sehingga muncullah Kurikulum 1994 dengan tambahan Suplemen 1999.

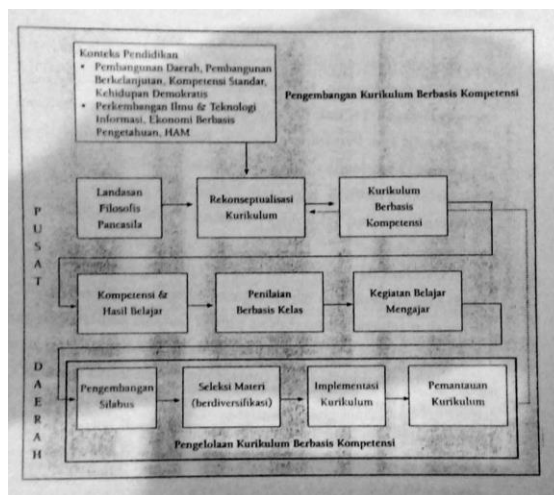
8. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004

Runtuhnya rezim Orde Baru yang otoriter menjadi sebuah kesempatan besar untuk “merombak” sistem pendidikan nasional. Jadi tidak hanya kurikulumnya saja yang direvisi, namun juga mengganti undang-undangnya. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 beserta aturan-aturan turunannya dianggap tidak lagi relevan dengan semangat reformasi. Selama lebih dari 30 tahun Presiden Soeharto berkuasa, kebijakan pendidikan yang terlalu etatis tidak memberi peluang kepada rakyat dan masyarakat untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka sendiri. Kurikulum yang diterapkan dianggap masih terlalu sentralistik dan masih sarat dengan subjek akademik yang tidak jelas kefokusannya (Miarso 2011).

Iklim reformasi mendesak untuk segera dimunculkan sebuah kurikulum baru bertepatan dengan masa penerapan kurikulum 1994 yang hampir menginjak 10 tahun. Penyelenggaraan pendidikan nasional yang sentralistik dituntut untuk bertransformasi menjadi desentralisasi dalam tajuk otonomi daerah. Perubahan ini dilandasi oleh PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Sofyatiningrum 2002). Maka dikeluarkanlah Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK 2004. Kurikulum ini diharapkan dapat menjawab semua tuntutan reformasi bidang pendidikan dan pembelajaran. Pilihan penggunaan nama kompetensi menandakan bahwa muatan bahan ajar bukan hanya bisa harus dikuasai secara akademik, namun semestinya juga bisa diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Peserta didik diharapkan bisa menguasai materi ajar secara lebih mendalam melalui pengalaman belajar yang lebih kontekstual, bukan tekstual atau teoritis semata.

Pembelajaran berbasis kompetensi memerlukan suatu standar minimum kompetensi

yang harus dikuasai oleh siswa secara terukur (Majid 2006). Keterhubungan dalam pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai sebuah kurikulum nasional dapat dilihat dari bagan alur berikut ini (Pusat Kurikulum 2002):



Gambar 1 Bagan alur kurikulum nasional

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai kinerja atau kualitas penyelesaian kerja yang minimal berhasil baik sebagai hasil dari penggunaan kemampuan atau kapabilitas. Sedangkan kemampuan sendiri adalah hasil penerapan dari kombinasi yang mempersyaratkan tiga ranah; pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku (Suparman 2014). Sehingga rumusan kompetensi dalam KBK 2004 ini sesungguhnya merupakan pernyataan tentang apa yang mesti diketahui, disikapi, dan dilakukan oleh siswa dalam mencapai hasil belajar yang sudah distandarkan. Kurikulum dan hasil belajar dalam KBK ini berisi perencanaan pengembangan kompetensi peserta didik mulai dari usia dini hingga SMA (Pusat Kurikulum 2002). Oleh karena itu, kompetensi hanya bisa dicapai melalui serangkaian proses belajar yang menuntut adanya pengalaman langsung terhadap pencapaian tujuan instruksional. Tanpa pengalaman langsung, maka hasil belajar, berupa aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor tidak akan mungkin bisa tercapai. Jadi pendekatan pembelajaran yang mesti dikembangkan di kelas-kelas harus berorientasi pada keaktifan siswa dalam belajar, atau yang biasa disebut dengan pembelajaran aktif.

Untuk mencapai Kompetensi Dasar (KD), guru diwajibkan untuk menyusun pengalaman belajar yang runtut dalam bentuk silabus dan RPP (Rencana Program Pengajaran). Pengalaman belajar merupakan kegiatan fisik dan juga mental yang mesti dilakukan oleh setiap siswa secara sistematis untuk mencapai hasil belajar yang terbaik. Maka materi ajar yang dipilih sebaiknya bermakna, yakni berupa kecakapan hidup yang langsung bisa dipakai dalam memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari (Rahim 2007).

Hanya saja kurikulum ini hanya berlangsung sebentar saja, sekitar kurang lebih dua tahun. Salah satunya dikarenakan adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang yang baru ini mendorong dibuatnya standar-standar nasional pendidikan yang di dalamnya juga mengatur tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kurikulum yang lebih mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lokal daerah sesuai dengan dorongan otonomi pendidikan. Maka kemudian muncullah KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

Kurikulum 2006, atau yang biasa kita sebut dengan KTSP sebenarnya merupakan perwujudan kepercayaan pemerintah terhadap sekolah dan peranan publik di ranah pengembangan pendidikan. Kurikulum ini merupakan penjabaran dari skema reformasi pendidikan yang mendesak agar bisa diwujudkannya otonomi pendidikan yang selaras dengan iklim otonomi daerah. Diharapkan ke depan tidak ada lagi kurikulum yang bersifat sentralistik.

Pengembangan KTSP sebagai sebuah perwujudan dari otonomi daerah dan juga otonomi sekolah / madrasah pada pengembangannya masih tetap menggunakan pendekatan KBK dalam standar isi. Pada proses pelaksanaannya, mesti mengintegrasikan dengan kebutuhan akan pengembangan potensi dan kecakapan peserta didik serta tuntutan kondisi lingkungannya (Muhaimin dkk 2008).

Guru ditekankan untuk dapat melaksanakan paket kurikulum dari pusat tanpa memperhatikan kondisi dan kebutuhan di tingkat daerahnya. Artinya, keberhasilan pendidikan nasional tidak lagi hanya menjadi beban tanggung jawab pemerintah pusat saja, tetapi seluruh stakeholder pendidikan, baik itu pemerintah daerah, dewan pendidikan, sekolah, komite sekolah, guru dan juga segenap masyarakat. Dari sinergisasi ini diharapkan dapat mengembangkan pola pengelolaan pendidikan yang memiliki kultur partisipatif.

KTSP memberi kesempatan bagi guru dan pengelola sekolah untuk berpartisipasi secara kreatif dalam mengembangkan kurikulum di sekolah dengan merujuk pada standar-standar nasional yang dibuat oleh Pemerintah. Diversifikasi kurikulum bertujuan agar pembelajaran yang dikembangkan di sekolah dapat lebih kontekstual dengan lingkungan alam-sosial siswa melalui proses yang berpusat mereka sendiri (Suwignyo 2007). Sebaik-baiknya pendekatan pembelajaran adalah proses yang penuh dengan kebermaknaan. Bermakna mengandung arti bahwa pembelajaran di kelas banyak memiliki keselarasan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan lokal sekitar.

Pada kenyataannya di banyak lapangan, agar terkesan sudah “ber-KTSP”, maka banyak sekolah ramai-ramai mengumpulkan berbagai dokumen terkait dengan administrasi dan perencanaan pembelajaran. Bagaimana pun caranya, dokumen tersebut harus berhasil dibuat hingga menjadi sebuah bundel besar. Bila ada pemeriksaan atau penilaian akreditasi, maka bundel dokumen itulah yang akan ditunjukkan. Sekolah kadang tidak perlu kesulitan untuk menyediakannya, sehingga guru-guru tidak perlu repot-repot membuat silabus dan RPP. Dokumen KTSP bisa didapat dengan sangat mudah, mulai dari mengunduh dari internet, menyalin dari sekolah lain, hingga membeli dengan menggunakan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Bahkan di beberapa daerah ada oknum-oknum Dinas Pendidikan yang “sangat” baik hati untuk menawarkan jasa penyediaan dokumen KTSP. Ini tentu tidak gratis. Kurikulum ternyata bisa jadi bisnis komersil.

Pengembangan KTSP semestinya dapat menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia kerja (Arifin 2011). Membuat kurikulum bukan perkara ringan bagi sekolah-sekolah kita. Diperkenalkannya setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri belum bisa dimanfaatkan sebagai sebuah kesempatan untuk berinovasi, tapi justru lebih dipandang sebagai sebuah beban. Sekolah yang sebelumnya berada di zona nyaman, tiba-tiba dipaksa untuk bisa lebih inovatif, serta bisa lebih bekerja keras untuk menciptakan sendiri sistem layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan karakteristik peserta didik. Pangkal persoalannya antara lain pada faktor kompetensi guru.

Berdasarkan Uji Kompetensi Guru (UKG) yang diselenggarakan pada tahun 2012 kemarin, nilai rata-rata nasional baru sampai pada angka 42,25. Tes ini hanya dikhususkan untuk guru-guru yang telah tersertifikasi saja. Artinya, guru-guru tersertifikasi yang semestinya secara formal sudah dianggap profesional, ternyata nilai rata-ratanya masih rendah. Lantas, bagaimanakah dengan kompetensi guru-guru yang belum tersertifikasi? Secara logika, hasilnya tentu tidak akan lebih baik dari guru-guru yang sudah tersertifikasi. Bila kondisinya seperti ini, manalah mungkin para guru bisa diberikan beban tambahan sebagai seorang desainer kurikulum bagi sekolahnya?

Hanya delapan provinsi yang guru-gurunya sudah berada di atas nilai rata-rata nasional. Delapan provinsi tersebut berada di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali. Sedangkan wilayah Kalimantan, Sulawesi dan daerah Indonesia Timur masih tertinggal. Ini menandakan bahwa persebaran tingkat kualitas pendidikan belum merata ke semua wilayah NKRI. Kompetensi guru ini adalah prasyarat mutlak yang harus terlebih dahulu dipenuhi agar implementasi

kurikulum bisa berjalan sesuai harapan. Sebab bagaimanapun, guru merupakan eksekutor lapangannya.

10. Kurikulum Nasional 2013

Kurikulum 2013 sejatinya masih Kurikulum Berbasis Kompetensi juga. Pengembangan kurikulum ini akan diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik. Isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) mata pelajaran dan dirinci lebih lanjut ke dalam Kompetensi Dasar (KD). Keberadaan Kompetensi Inti ini yang membedakan dengan KTSP 2006 dan KBK 2004. Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris kompetensi bukan konsep, generalisasi, topik atau sesuatu yang berasal dari pendekatan “disciplinary-based curriculum” atau “content-based curriculum” (Kemendikbud 2013).

Bila merujuk apa yang dikembangkan di sekolah-sekolah Amerika Serikat, penggunaan Standar Kurikulum Inti diharapkan dapat mendorong munculnya keseimbangan antara akuntabilitas dan relevansi. Bila tidak diseimbangkan, maka tuntutan akuntabilitas akan mendorong munculnya motivasi belajar siswa yang sekedar ingin mengejar nilai yang tinggi, tapi melupakan esensi dari pembelajaran itu sendiri. Kurikulum di sekolah harus disusun agar relevan dan bermakna. Peran standar-standar ini adalah untuk menjaga kualitas pendidikan di seluruh negara-negara bagian, sambil memberi kesempatan bagi para guru untuk merancang kurikulum kreatif yang relevan dengan siswa dalam konteks local (Drake & Susan 2013).

Salah satu pokok penting dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran di kelas. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran merupakan suatu model pembelajaran yang mendorong siswa beraktivitas seperti layaknya seorang ilmuwan atau ahli sains. Siswa dipandu untuk dapat memecahkan masalah melalui kegiatan perencanaan yang matang, pengumpulan data yang cermat, serta menghasilkan kesimpulan yang tepat melalui analisis data. Prosedur yang mesti dilaksanakan dalam pendekatan saintifik ini terdiri dari aktivitas mengamati, menanya, menalar, mencoba, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan (Abidin 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengembangan Kurikulum di Indonesia

Penerapan suatu kurikulum adalah bagian dari persiapan menghadapi tantangan zaman di masa mendatang, minimal untuk masa dua puluh tahun lagi. Pada zaman dua puluh tahun nanti, dunia pekerjaan sedang diisi oleh anak-anak yang sedang bersekolah di masa sekarang. Maka sesungguhnya kurikulum hari ini adalah cerminan masa depan bangsa. Oleh sebab itu pendidikan harus dikembangkan dalam rancangan struktur kurikulum yang bisa menerawang jiwa zaman untuk setidaknya dua dekade yang akan datang.

Sejak kian cepatnya perubahan dalam bidang teknologi informasi, dunia seakan bergerak semakin cepat pula. Bila pendidikan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, maka suatu bangsa akan semakin tertinggal jauh dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Keunggulan pendidikan suatu bangsa sebetulnya bukan ditentukan oleh kebijakan kurikulumnya, tapi lebih dipengaruhi oleh rencana pembangunan nasional secara makro. Apa pun kebijakannya, kurikulum harus selaras dengan arah pembangunan, sebab pendidikan bukanlah entitas kebijakan yang berdiri sendiri. Pendidikan adalah salah satu pilar utama pembangunan, dan sangat terkait erat dengan sektor-sektor yang lain. Kesejahteraan ekonomi, dinamika politik dan sosial-budaya, bahkan stabilitas keamanan dalam negeri berpengaruh kuat terhadap perkembangan pendidikan. Begitu pun juga sebaliknya. Sehingga perlu adanya kurikulum yang fleksibel atau adaptif dengan setiap keadaan, dan harus dikembangkan dengan pendekatan yang multidimensional.

Dalam Pembukaan UUD 1945, tersurat tentang tujuan umum pendidikan nasional yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Suatu kehidupan yang cerdas selain memiliki arti pengembangan kehidupan intelektual, juga merupakan “*intelligent living*” yang mendorong terciptanya kualitas hidup yang manusiawi. Tujuan umum pendidikan nasional tersebut kemudian dijabarkan dalam undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada tingkat yang lebih operasional, sistem pendidikan nasional harus memiliki relevansi bagi pembangunan nasional. Setidaknya ada 3 kriteria relevansi pendidikan terhadap pembangunan nasional, yaitu: (1) kriteria akademik, berupa standar pendidikan yang ditetapkan dalam bentuk kurikulum nasional, (2) kriteria religio-moral, yakni mendidik manusia Indonesia yang bertakwa, dan berkepribadian luhur, serta (3) kriteria ketenagakerjaan, yaitu untuk menghasilkan tenaga pembangunan yang kompeten di bidang kerjanya (H.A.R Tilaar 1990).

Di bawah ini merupakan tabel untuk menjelaskan perkembangan kurikulum berdasarkan periode politik dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1 Perkembangan kurikulum berdasarkan periode politik dan aturan perundang-undangan

Tahun	Periode Politik	Nama Kurikulum	Landasan Pendidikan
1945 – 1949	REVOLUSI FISIK	1. Rencana Pelajaran (<i>Leerplan</i>)1947	
1949 – 1950	MASA RIS		Muncul UU Pendidikan 1950
1950 – 1959	DEMOKRASI PARLEMENTER	2. Rencana Pelajaran Terurai 1952	UU Pendidikan 1954
1959 – 1966	ORDE LAMA	3. Rencana Pendidikan 1964	Keluar Penpres No.19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila
1966 – 1998	ORDE BARU	4. Kurikulum 1968	
		5. Kurikulum 1975	
		6. Kurikulum 1984	
		7. Kurikulum 1994	UU No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
1998 – Sekarang	ERA REFORMASI	(Kurikulum 1994 - Suplemen 1999)	
		8. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004	UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
		9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006	PP. No. 19 Tahun 2005
		10. Kurikulum Nasional 2013	PP. No. 32 Tahun 2013

Bila melihat dari tabel di atas, maka terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum di Indonesia.

1. Faktor perubahan politik, kurikulum berkembang atau dirubah karena terjadi perubahan situasi politik atau juga karena adanya pergantian kepemimpinan nasional. Kurikulum atau Rencana Pelajaran 1947 di era awal kemerdekaan muncul karena adanya semangat yang sangat besar untuk menggantikan kurikulum sekolah yang masih dipengaruhi oleh model pendidikan zaman kolonial Belanda. Sedangkan kurikulum 1964, disusun untuk menguatkan doktrin-doktrin politik pemerintahan Orde Lama atau yang dikenal juga dengan zaman Demokrasi Terpimpin. Justru ini berlawanan dengan kurikulum 1968 yang muncul tiba-tiba. Kurikulum ini adalah hasil pemikiran pendukung pemerintahan awal Orde Baru yang bertekad untuk memperbaiki kondisi negara pasca penumpasan gerakan G.30.S/(PKI).
2. Faktor perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional, kurikulum berkembang atau mengalami revisi seiring dengan dinamika yang terjadi pada kondisi masyarakat dan perencanaan pembangunan nasional dalam merespon perubahan zaman. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kurikulum relatif berkembang dan mengalami penyempurnaan secara berkala kurang lebih setiap 10 tahun. Sehingga di era ini tidak ada revisi kurikulum yang besar, sebab yang penyusunannya lebih pada penyempurnaan dari struktur yang lama. Perkembangan kurikulum ini juga mesti diselaraskan dengan amanah perencanaan pembangunan nasional yang

tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN.

Perkembangan kurikulum yang relatif berlangsung secara tertib dan berkala memang hanya terjadi pada masa Orde Baru. Ini terjadi karena situasi politik cenderung stabil di bawah kepemimpinan otoriter Presiden Soeharto. Kurang lebih setiap sepuluh tahun sekali, kurikulum baru mengalami perbaikan. Tidak terlalu banyak ditemukan perbaikan yang signifikan, kecuali pada beberapa hal yang menyangkut soal orientasi pembelajaran. Pada kurikulum 1975, kurikulum berorientasi pada tujuan umum dan khusus. Pada kurikulum ini juga dikenalkan tentang adanya pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Sedangkan pada kurikulum 1984, orientasi kurikulum ditekankan pada tujuan belajar yang didasarkan pada konsep esensial yang telah ditetapkan dari awal. Pada kurikulum 1994, tujuan belajar tersebut dijabarkan ke dalam program kerja guru (Syam dkk 1999).

Pengembangan kurikulum modern dan kaitannya dengan kegiatan instruksional (pembelajaran) setidaknya meliputi empat elemen dasar. Pertama, mengidentifikasi maksud dan tujuan pendidikan. Kedua, memilih pengalaman belajar atau proses pembelajaran yang relevan untuk pencapaian tujuan pendidikan. Ketiga, mengelola pengalaman belajar secara sistematis. Keempat, melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengalaman belajar yang sudah dikerjakan tersebut (Suparman 2014). Namun, pada kenyataannya, pemerintah seringkali mengganti kurikulum karena adanya tuntutan politik, sedangkan aspek-aspek lain yang semestinya juga diperhatikan menjadi dasar pengembangan kurikulum justru tidak dipertimbangkan. Tampak nyata bahwa selain

politik, nyaris tidak mampu menyentuh perubahan kurikulum (Hasan & Hamid).

Sulit melepaskan kurikulum dari situasi politik dan pemimpin politik yang tengah berkuasa, karena kurikulum itu sendiri adalah sebuah produk politik. Namun bukan berarti penguasa pemerintahan dapat menetapkan suatu kurikulum sekehendak hati dan hasrat politiknya. Kurikulum adalah suatu politik pendidikan yang ditetapkan untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam sebuah negara hukum, kurikulum merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang disusun sebagai turunan dari konstitusi. Maka perubahan atau perkembangan kurikulum harus memperhatikan konstitusi atau aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 hingga tahun 2016 sekarang ini, pendidikan kita telah mengalami sepuluh kali perkembangan atau perubahan kurikulum. Mulai dari kurikulum Rencana Pelajaran 1947, Rencana Pelajaran Terurai 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, dan Kurikulum Nasional 2013. Perkembangan awal kurikulum di Indonesia disusun dari bentuk yang sangat sederhana dengan biaya terbatas dan tanpa melewati proses kajian dan uji coba lapangan yang menyeluruh. Sejak era Orde Baru hingga saat ini, pengembangan kurikulum telah dirancang secara lebih lengkap dan kompleks, menggunakan biaya yang cukup sehingga dapat melakukan kajian awal yang lebih matang dan mendalam.

Setidaknya terdapat dua faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum di Indonesia, yakni: perubahan politik, serta perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional. Selain berkembang karena terjadi perubahan situasi politik atau juga karena adanya pergantian kepemimpinan nasional, kurikulum juga mengalami revisi seiring dengan dinamika yang terjadi pada kondisi masyarakat yang dikaji dalam perencanaan pembangunan nasional dalam merespon perubahan zaman.

SARAN

Rencana pengembangan kurikulum sebaiknya jangan dipengaruhi oleh situasi politik yang tengah terjadi, namun seharusnya disusun melalui kajian dan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam. Implementasi pelaksanaan kurikulum di sekolah semestinya juga memperhatikan rencana pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan di daerah dapat memberi kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup di masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yunus, *Desain Sistem Pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Arifin, Zainal, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Asrohah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001. Cet. Ke-2.
- Balitbang Depdikbud, *Kurikulum 1994: Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Sekolah Menengah Umum (SMU)*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Daradjat, Zakiah, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016. (Cet. Ke-12).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985.
- Djamin, Zulkarnain, *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Sejak Repelita Pertama*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: 1984.
- Drake, Susan M., *Menciptakan Kurikulum Terintegrasi yang Berbasis Standar*. Jakarta: Indeks, 2013.
- H.A.R. Tilaar, *Pendidikan dalam Pembangunan Nasional Menyongsong Abad XXI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Hamalik, Oemar, *Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009 (Cet. 6).
- Hasan, S. Hamid, *Perkembangan Kurikulum: Perkembangan Ideologis dan Teoritik Pedagogis* (Makalah, Tanpa Tahun).
- Indar, M. Djumberansyah, *Perencanaan Pendidikan: Strategi dan Implementasinya*. Surabaya: Karya Abditama, 1995.
- Jasin, Anwar, *Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar: Sejak Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Kadir, Sardjan, dan Umar Ma'sum, *Pendidikan di Negara sedang Berkembang*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Kartodirdjo, Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto (ed). *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Dokumen Kurikulum 2013*. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012) Hal. 7.

- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Majid, Abdul, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006, cetakan ke-2.
- Mandalika, J., dan Usman Mulyadi, *Dasar-dasar Kurikulum*. Surabaya: Penerbit SIC, 2004.
- Marlow, Rebecca, Ferguson (ed). *World education Encyclopedia: A Survey of Educational Systems World Wide*. Farmington Hills: Gale Group, 2002.
- Miarso Yusufhadi. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Cet. Ke 5), h. 655-657.
- Muhaimin, Sutiah, dan Sugeng Listyo Prabowo, *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Nugraha, Iskandar P., *Teosofi, Nasionalisme dan Elite Modern Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu, 2011.
- Pusat Kurikulum, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Balitbang Depdiknas, 2002.
- Pusat Kurikulum, *Pengembangan Silabus Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Balitbang Depdiknas, 2002.
- Rahim, Farida, *Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka: 1950 – 1964*. Jakarta: Setneg RI, 1981. Cet. Ke-5.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: SetnegRI, 1995.
- Slamet, St. Y., *Dasar-Dasar Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2007.
- Sofyatiningrum, Etty, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, 2002.
- Suparman, M. Atwi, *Desain Instruksional Modern: Panduan Para Pengajar dan Inovator Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014. Edisi ke-4.
- Suwignyo, Agus, *Kurikulum dan Politik (Kebijakan) Pendidikan*, dalam Forum Mangunwijaya, *Kurikulum yang Mencerdaskan: Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Syam, Sukma, dkk., *Wawasan Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial UNJ, 1999.
- Usman, Moh. Uzer, *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002. Cet. Ke 14.
- Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1958.

RIWAYAT PENULIS

Penulis bernama lengkap Agung Pardini. Kecintaannya untuk mempelajari masa lalu, mengantarkannya menjadi seorang Guru Sejarah sejak masih duduk di bangku kuliah di Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta. Pada bulan September 2008 memulai aktivitas baru menjadi anggota tim trainer pada program Makmal (Laboratorium) Pendidikan milik Dompot Dhuafa. Pada awal tahun 2014, laki-laki berdarah Jawa (diaspora) yang kerap disapa dengan nama Guru Agung, oleh Dompot Dhuafa ditugaskan menjadi penanggung jawab program Sekolah Guru Indonesia (SGI). Saat sekarang ini, selain masih aktif dalam membina pengembangan cabang-cabang SGI di 12 provinsi, juga tengah menempuh studi S2 di program magister manajemen pendidikan Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.